

PENGARUH PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Andreas Eko ¹, Yovinus ², Atik Rochaeni ³

ABSTRACT

This article examines the effect of supervision by the Environmental Agency on community participation in community-based waste management in West Bandung Regency. The study is grounded in the problem that waste management has not been fully optimal, as indicated by the limited coverage of waste handling, the uneven development of active waste banks, and the moderate level of community involvement in waste management programs. This study uses an explanatory research design with a quantitative approach and a survey method. The research involved 98 respondents selected from 4,380 households participating in community-based waste management programs under the supervision of the Environmental Agency. Data were collected through questionnaires using a Likert scale and analyzed through descriptive statistics, simple linear regression, significance testing, and the coefficient of determination. The findings show that supervision by the Environmental Agency is categorized as moderate, with an achievement level of 65.31%. Community participation is also categorized as moderate, with an achievement level of 63.01%. The regression analysis produces the equation $Y = 6.044 + 0.623X$, indicating that improved supervision increases community participation. The hypothesis test shows a positive and significant effect, with t -count 12.505 greater than t -table 1.66088 and a significance value of $0.000 < 0.05$. The coefficient of determination shows that supervision contributes 62.2% to community participation, while the remaining 37.8% is influenced by other factors. This article concludes that supervision plays a strategic role in strengthening community participation in waste management. Therefore, supervision needs to be improved through accurate data, regular monitoring, corrective follow-up, community education, and stronger support for waste banks and 3R-based environmental programs.

Keywords: supervision, community participation, community-based waste management, Environmental Agency, West Bandung Regency.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Persoalan sampah merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola lingkungan hidup daerah. Sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga menyangkut kualitas kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan,

kapasitas pelayanan pemerintah daerah, dan kesadaran warga dalam menjaga ruang hidupnya. Semakin tinggi jumlah penduduk dan aktivitas konsumsi masyarakat, semakin besar pula timbulan sampah yang harus dikelola. Apabila tidak ditangani secara tepat, sampah dapat menimbulkan pencemaran, menurunkan kualitas lingkungan, serta memperlihatkan lemahnya tata kelola pelayanan publik di bidang lingkungan.

Secara normatif, pengelolaan sampah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan lingkungan. Dalam kerangka pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Artinya, pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban menyediakan layanan pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, tetapi juga perlu mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pengelolaan sampah dari sumbernya.

Paradigma pengelolaan sampah saat ini tidak lagi cukup bertumpu pada pola lama “kumpul, angkut, buang”. Pendekatan tersebut cenderung membebani tempat pemrosesan akhir dan tidak menyelesaikan masalah dari sumbernya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui prinsip 3R, yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle*, menjadi penting untuk diperkuat. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek layanan kebersihan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam memilah, mengurangi, memanfaatkan, dan mengelola sampah di tingkat rumah tangga maupun lingkungan.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang menghadapi persoalan pengelolaan sampah cukup serius. Pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas sosial-ekonomi, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berdampak pada meningkatnya volume timbulan sampah. Tesis yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi keterangkutan sampah, keberlanjutan bank sampah, maupun partisipasi masyarakat dalam

program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dari 165 desa, baru sebagian yang memiliki program bank sampah aktif dan melibatkan masyarakat secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat hanya diselesaikan melalui pendekatan teknis. Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci karena sebagian besar sampah berasal dari aktivitas rumah tangga. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, kemauan, dan kebiasaan untuk memilah serta mengelola sampah sejak dari sumbernya. Namun, partisipasi tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya. Diperlukan pembinaan, pendampingan, edukasi, dan pengawasan yang konsisten dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam konteks ini, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menjadi variabel penting. Pengawasan bukan hanya bermakna memeriksa dan menilai pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pengawasan yang baik seharusnya akurat, tepat waktu, objektif, komprehensif, ekonomis, fleksibel, terpusat pada titik strategis, dan menghasilkan tindakan korektif. Apabila pengawasan tidak berjalan efektif, maka program pengelolaan sampah berbasis masyarakat berpotensi berhenti pada kegiatan administratif tanpa menghasilkan partisipasi warga yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup berada pada kategori “Cukup” dengan tingkat capaian 65,31%, sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga berada pada kategori “Cukup” dengan tingkat capaian 63,01%. Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap partisipasi masyarakat, dengan kontribusi pengaruh sebesar 62,2%. Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan memiliki peran penting dalam mendorong keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Artikel ini penting karena memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan pemerintah dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan lingkungan.

b. Tinjauan Teoretis

Kajian teoretis dalam artikel ini bertumpu pada konsep pengawasan sebagai variabel utama. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, standar, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan berfungsi untuk mencegah penyimpangan, menemukan kelemahan, memberikan umpan balik, serta mendorong tindakan perbaikan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Teori pengawasan yang digunakan mengacu pada Koontz dan Cyril O'Donnell dalam Handyaningrat (1996), yang menjelaskan bahwa pengawasan efektif harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu akurat, tepat waktu, objektif dan komprehensif, terpusat pada titik-titik strategis, ekonomis, fleksibel, dan korektif. Akurat berarti hasil pengawasan harus mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Tepat waktu berarti pengawasan dilakukan pada saat yang relevan agar masalah dapat segera ditindaklanjuti. Objektif dan komprehensif menunjukkan bahwa pengawasan harus adil serta mencakup aspek penting program. Terpusat pada titik strategis berarti pengawasan diarahkan pada wilayah atau kegiatan yang paling menentukan keberhasilan program. Ekonomis berarti pengawasan dilakukan secara efisien. Fleksibel berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lapangan. Sementara itu, korektif berarti hasil pengawasan harus menghasilkan perbaikan nyata.

Variabel kedua dalam artikel ini adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan warga dalam suatu kegiatan, baik dalam bentuk pikiran, tenaga, keahlian, waktu, maupun tanggung jawab terhadap hasil kegiatan. Dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, partisipasi tidak hanya berarti kehadiran warga dalam kegiatan kebersihan, tetapi juga mencakup kesadaran memilah sampah, keterlibatan dalam bank sampah, kesediaan mengikuti sosialisasi, serta kemampuan mengelola sampah rumah tangga secara mandiri.

Teori partisipasi masyarakat yang digunakan mengacu pada Plumer dalam Yulianti (2012), yang menjelaskan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, jenis kelamin, serta kepercayaan terhadap budaya tertentu. Dalam konteks pengelolaan sampah, pengetahuan dan keahlian menentukan kemampuan warga memahami pemilahan dan pemanfaatan sampah. Pekerjaan masyarakat memengaruhi ketersediaan waktu untuk terlibat. Tingkat pendidikan berkaitan dengan kemampuan memahami informasi lingkungan. Jenis kelamin berkaitan dengan pembagian peran sosial dalam kegiatan kebersihan, sedangkan budaya memengaruhi kebiasaan dan cara masyarakat memandang tanggung jawab terhadap lingkungan.

Selain itu, artikel ini juga menggunakan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang menempatkan warga sebagai aktor utama dalam pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumbernya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip 3R, yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Melalui prinsip tersebut, sampah tidak hanya dipandang sebagai barang sisa yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah melakukan pembinaan serta pengawasan secara berkelanjutan.

Dengan kerangka tersebut, artikel ini menempatkan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup sebagai faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Semakin efektif pengawasan yang dilakukan, semakin besar peluang masyarakat untuk terlibat secara aktif, terarah, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Sebaliknya, pengawasan yang lemah dapat menyebabkan rendahnya kesadaran, minimnya keterlibatan, dan tidak berjalannya program pengelolaan sampah secara optimal.

c. Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan tipe penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif dan metode survei. Tipe *explanatory research* digunakan karena penelitian bertujuan menjelaskan pengaruh antara variabel pengawasan Dinas Lingkungan Hidup sebagai variabel independen dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian menguji hubungan antarvariabel melalui data numerik dan analisis statistik.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bandung Barat, dengan fokus pada masyarakat yang menjadi peserta program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di bawah pembinaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Populasi penelitian berjumlah 4.380 kepala keluarga yang tersebar pada 10 kecamatan. Sampel penelitian berjumlah 98 responden, yang ditentukan menggunakan rumus Taro Yamane dengan tingkat kesalahan 10%. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Stratified Random Sampling* agar responden dapat mewakili karakteristik populasi berdasarkan sebaran wilayah.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dengan menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel pengawasan dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, regulasi, laporan Dinas Lingkungan Hidup, data statistik daerah, serta literatur yang relevan dengan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Variabel pengawasan Dinas Lingkungan Hidup diukur melalui tujuh dimensi, yaitu akurat, tepat waktu, objektif dan komprehensif, terpusat pada titik strategis, ekonomis, fleksibel, dan korektif. Adapun variabel partisipasi masyarakat diukur melalui dimensi pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Setiap dimensi diturunkan ke dalam indikator dan item pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat capaian masing-masing variabel berdasarkan skor aktual dan skor ideal. Sementara itu, analisis inferensial digunakan untuk menguji pengaruh pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap partisipasi masyarakat melalui uji asumsi klasik, regresi linear sederhana, uji signifikansi, dan koefisien determinasi. Instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa data yang digunakan layak dianalisis secara ilmiah.

2. PEMBAHASAN

a. Kondisi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat berada pada kategori “Cukup”. Hal ini ditunjukkan oleh skor aktual sebesar 8.960 dari skor ideal 13.720, dengan tingkat capaian 65,31%. Persentase tersebut berada pada interval 52,01%–68,00%, sehingga dapat dimaknai bahwa fungsi pengawasan telah berjalan, tetapi belum mencapai tingkat yang optimal. Dengan kata lain, DLH telah melaksanakan tugas pengawasan melalui pemantauan, evaluasi, pencatatan, dan tindak lanjut terhadap program pengelolaan sampah, namun pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan pada beberapa aspek strategis.

Jika dianalisis berdasarkan syarat pengawasan efektif menurut Koontz dan Cyril O'Donnell dalam Handayaniingrat, pengawasan yang baik harus bersifat akurat, tepat waktu, objektif dan komprehensif, terpusat pada titik strategis, ekonomis, fleksibel, serta korektif. Dalam penelitian ini, seluruh dimensi

pengawasan DLH masih berada pada kategori cukup, yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen pengendali yang kuat dalam mendorong efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Capaian tertinggi terdapat pada dimensi pengawasan korektif sebesar 65,71%, sedangkan capaian terendah terdapat pada dimensi pengawasan ekonomis sebesar 65,00%. Selisih capaian yang tidak terlalu jauh menunjukkan bahwa persoalan pengawasan tidak hanya terletak pada satu aspek tertentu, tetapi menyebar hampir merata pada seluruh dimensi pengawasan.

Dimensi korektif yang memperoleh capaian tertinggi menunjukkan bahwa DLH relatif telah berupaya memberikan arahan perbaikan terhadap pelaksanaan program pengelolaan sampah, terutama ketika ditemukan kendala di lapangan. Namun, capaian tersebut belum cukup kuat untuk menunjukkan bahwa tindak lanjut pengawasan telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, tindak lanjut atas temuan pengawasan masih perlu diperkuat melalui rencana aksi yang lebih konkret, seperti pembinaan bank sampah, pendampingan teknis pemilahan sampah, peningkatan kapasitas kader lingkungan, dan evaluasi berkala terhadap desa atau wilayah yang partisipasinya rendah.

Sementara itu, rendahnya capaian dimensi ekonomis menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya pengawasan belum sepenuhnya efisien. DLH masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan petugas, wilayah pengawasan yang luas, jumlah desa yang banyak, serta kebutuhan monitoring yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat pengawasan berpotensi lebih bersifat reaktif daripada preventif. Pengawasan baru efektif apabila tidak hanya dilakukan setelah muncul masalah, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi persoalan sejak awal melalui pemetaan wilayah rawan sampah, data partisipasi masyarakat, dan pemantauan kegiatan bank sampah secara terjadwal.

Dengan capaian 65,31%, dapat disimpulkan bahwa pengawasan DLH Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki dasar pelaksanaan, tetapi belum sepenuhnya kuat sebagai alat perubahan perilaku masyarakat. Pengawasan masih perlu ditingkatkan dari sekadar fungsi administratif menjadi fungsi pembinaan,

pengendalian, dan pemberdayaan. Penguatan pengawasan perlu diarahkan pada akurasi data, ketepatan waktu monitoring, efisiensi sumber daya, fleksibilitas pendekatan lapangan, serta tindakan korektif yang benar-benar berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

b. Kondisi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung Barat juga berada pada kategori “Cukup”. Berdasarkan hasil penelitian, skor aktual variabel partisipasi masyarakat adalah 6.175 dari skor ideal 9.800, dengan tingkat capaian sebesar 63,01%. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah, tetapi keterlibatan tersebut belum sepenuhnya aktif, merata, dan berkelanjutan.

Apabila dilihat dari masing-masing dimensi, capaian tertinggi terdapat pada dimensi tingkat pendidikan sebesar 65,35%. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan masyarakat relatif mendukung kemampuan memahami pentingnya pengelolaan sampah. Dimensi jenis kelamin memperoleh capaian 64,82%, yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan telah memiliki keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan sampah, meskipun perannya masih berbeda sesuai jenis kegiatan. Dimensi pekerjaan masyarakat memperoleh capaian 63,88%, yang menandakan bahwa kesibukan kerja masih memengaruhi tingkat keterlibatan warga. Sementara itu, dimensi terendah adalah pengetahuan dan keahlian dengan capaian 58,00%, yang menunjukkan masih lemahnya kemampuan teknis masyarakat dalam memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan partisipasi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan kemauan untuk terlibat, tetapi juga dengan kapasitas pengetahuan dan keterampilan. Masyarakat belum sepenuhnya memahami praktik pengelolaan sampah berbasis 3R secara teknis, seperti pemilahan organik dan anorganik, pemanfaatan sampah bernilai ekonomi, pengelolaan bank sampah, serta pengurangan sampah dari sumbernya. Oleh

karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan melalui edukasi, pelatihan teknis, pendampingan komunitas, dan penguatan kelembagaan lingkungan di tingkat desa, RT/RW, maupun bank sampah.

c. Pengaruh Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Partisipasi Masyarakat

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 6,044 + 0,623X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila nilai pengawasan meningkat satu satuan, maka partisipasi masyarakat diprediksi meningkat sebesar 0,623. Dengan kata lain, semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Nilai konstanta 6,044 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tetap memiliki nilai dasar meskipun variabel pengawasan dianggap nol, tetapi peningkatan pengawasan tetap memberikan dorongan positif terhadap partisipasi.

Hasil uji signifikansi memperkuat temuan tersebut. Nilai t hitung sebesar 12,505 lebih besar daripada t tabel 1,66088, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, hipotesis alternatif diterima, sehingga pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 156,383 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan pengaruh pengawasan terhadap partisipasi masyarakat. Dengan demikian, secara statistik, pengawasan DLH bukan hanya

memiliki pengaruh parsial, tetapi juga membentuk model yang kuat dalam memprediksi tingkat partisipasi masyarakat.

Besaran pengaruh pengawasan terhadap partisipasi masyarakat terlihat dari nilai koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan nilai R Square sebesar 0,620, yang berarti pengawasan Dinas Lingkungan Hidup memberikan kontribusi sebesar 62,2% terhadap partisipasi masyarakat. Sementara itu, sisanya sebesar 37,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kesadaran individu, motivasi warga, ketersediaan sarana dan prasarana, peran RT/RW atau bank sampah, norma sosial, budaya lokal, serta dukungan anggaran pemerintah.

Temuan kuantitatif ini menegaskan bahwa pengawasan memiliki posisi penting dalam mendorong keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun, karena pengawasan dan partisipasi sama-sama masih berada pada kategori “Cukup”, maka pengaruh yang signifikan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kondisi pengelolaan sampah yang optimal. Artinya, DLH telah memiliki peran yang kuat dalam memengaruhi partisipasi masyarakat, tetapi kualitas pengawasan masih perlu ditingkatkan agar dampaknya terhadap perilaku masyarakat menjadi lebih nyata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung Barat sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan pemerintah daerah. Pengawasan yang akurat, tepat waktu, objektif, ekonomis, fleksibel, terpusat pada titik strategis, dan korektif akan mendorong masyarakat lebih aktif dalam memilah, mengurangi, dan mengelola sampah dari sumbernya. Sebaliknya, pengawasan yang belum optimal akan membuat partisipasi masyarakat tetap berada pada tingkat sedang dan belum mampu mendukung perubahan perilaku lingkungan secara menyeluruh.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat

berada pada kategori “Cukup” dengan tingkat capaian 65,31%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek efisiensi sumber daya, ketepatan data, konsistensi monitoring, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengawasan belum cukup kuat apabila hanya dilakukan secara administratif tanpa pembinaan lapangan yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga berada pada kategori “Cukup” dengan tingkat capaian 63,01%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki keterlibatan dalam pengelolaan sampah, tetapi belum sepenuhnya aktif, merata, dan berkesinambungan. Dimensi yang masih lemah terutama berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian masyarakat dalam memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah secara mandiri.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Persamaan regresi $Y = 6,044 + 0,623X$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengawasan akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Hasil uji hipotesis juga menunjukkan nilai t hitung $12,505 > t$ tabel $1,66088$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga pengaruh tersebut terbukti signifikan. Nilai koefisien determinasi sebesar 62,2% menunjukkan bahwa pengawasan DLH memiliki kontribusi dominan terhadap partisipasi masyarakat, sedangkan sisanya 37,8% dipengaruhi faktor lain seperti kesadaran individu, motivasi warga, fasilitas, dukungan anggaran, dan peran kelembagaan lokal.

Dengan demikian, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup merupakan faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Namun, karena kedua variabel masih berada pada kategori cukup, maka peningkatan kualitas pengawasan perlu dilakukan agar partisipasi masyarakat dapat berkembang lebih aktif, mandiri, dan berkelanjutan.

b. Saran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat perlu memperkuat sistem pengawasan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendataan yang lebih akurat, jadwal monitoring yang rutin, serta evaluasi berbasis wilayah prioritas. Pengawasan sebaiknya tidak hanya difokuskan pada aspek pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat, keberlanjutan bank sampah, pemilahan sampah dari sumber, serta efektivitas program 3R.

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan efisiensi sumber daya pengawasan melalui pemanfaatan teknologi, seperti sistem pelaporan digital, pemetaan titik timbulan sampah, dan basis data partisipasi masyarakat per desa. Dengan dukungan teknologi, pengawasan dapat dilakukan lebih cepat, hemat, terukur, dan responsif terhadap permasalahan di lapangan.

Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan melalui edukasi lingkungan, pelatihan teknis pengelolaan sampah, penguatan bank sampah, serta pelibatan RT/RW, PKK, karang taruna, tokoh masyarakat, dan lembaga desa. Partisipasi masyarakat tidak cukup dibangun melalui imbauan, tetapi perlu diperkuat melalui pendampingan yang konsisten, insentif sosial-ekonomi, dan keteladanan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. Dengan pengawasan yang lebih akurat, korektif, fleksibel, dan berkelanjutan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dapat berkembang lebih efektif serta mampu mengurangi ketergantungan terhadap pola lama “kumpul, angkut, buang.”

REFERENSI

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. (2023). *Data pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung Barat*. Bandung Barat: DLH Kabupaten Bandung Barat.
- Handyaningrat, S. (1996). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.

Narimawati, U. (2010). *Metodologi penelitian: Dasar penyusun penelitian ekonomi*. Jakarta: Genesis.

Riduwan, & Akdon. (2006). *Rumus dan data dalam aplikasi statistika*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yulianti, Y. (2012). *Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok* [Tesis, Universitas Andalas].

Regulasi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.